

Analisis Implementasi Prosedur Izin Kerja di Ketinggian Pada Proyek *Mass Rapid Transit (MRT) CP 101 PT Tokyu Construction* Lebak Bulus Jakarta Selatan Tahun 2018

Nadia Noerfaradilla¹, Putri Handayani²

Fakultas Ilmu – ilmu Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No. 9 Tol Tomang Jakarta Barat 11510

E-mail : dilla_faradilla@rocketmail.com¹, putri.handayani@esaunggul.ac.id²

ABSTRAK

Suatu upaya pencegahan kecelakaan kerja adalah dengan menerapkan SMK3. Salah satunya dengan cara penerapan izin kerja (*Safety Permit*). Badan pengusaha atau pengurus wajib menerapkan sistem izin kerja pada ketinggian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi prosedur izin kerja di ketinggian pada proyek *Mass Rapid Transit (MRT) CP 101 PT. Tokyu Construction* Lebak Bulus Jakarta Selatan. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Hasil wawancara dengan 4 informan serta telaah dokumen, menunjukkan prosedur izin kerja berdasarkan pada tahapan persiapan telah berjalan baik. Berdasarkan tahap proses, komponen penelitian sudah diterapkan dengan baik, namun pada perpanjangan izin kerja terdapat keterlambatan. Tahap penutupan prosedur izin kerja sudah diterapkan dengan baik pula. Peneliti mengharapkan perusahaan agar memperbaiki proses perpanjangan izin kerja dan untuk pemberhentian pekerjaan secara mendadak dapat dihindari dengan cara pengecekan kembali seluruh item yang terkait dengan izin kerja dan membuat prosedur terkait tindakan darurat serta mempertahankan komitmen pelaksanaan program yang mendukung berlangsungnya prosedur izin kerja baik di lapangan ataupun secara administratif.

Kata Kunci: Izin Kerja, *Safety permit*

ABSTRACT

An effort to prevent work accidents is to implement SMK3. One of them is by applying a work permit (Safety Permit). The business entity or management must implement a work permit system at an altitude. The purpose of this study was to determine the implementation of work permit procedures at altitude on the Mass Rapid Transit (MRT) project CP 101 PT. Tokyu Construction Lebak Bulus South Jakarta. This type of research uses a qualitative approach. The data used in this study are primary and secondary data. The results of interviews with 4 informants and document review showed that the work permit procedure based on the preparatory stages had gone well. Based on the process stage, the research component has been implemented well, but in the extension of the work permit there is a delay. The closing phase of the work permit procedure has been implemented well too. Researchers expect the company to improve the process of extending work permits and for sudden layoffs can be avoided by checking all items related to work permits and making procedures related to emergency actions and maintaining program implementation commitments that support work permit procedures both in the field and administrative.

Keywords: *Work permit, safety permit*

Pendahuluan

Perkembangan sektor di bidang pembangunan yang semakin pesat serta penerapan teknologi yang semakin canggih, penerapan kesehatan dan keselamatan kerja secara umum yang menjadi syarat utama dalam bekerja juga harus diperhatikan. Karena dalam melakukan pekerjaannya para pekerja menginginkan keselamatannya terjamin.

Suatu upaya pencegahan kecelakaan kerja adalah dengan menerapkan SMK3. Salah satu upaya penerapan SMK3 tersebut adalah dengan melaksanakan penerapan *Safety Permit* (Izin Kerja). *Safety permit* atau yang dikenal juga dengan istilah *work permit*, *permit to work*, atau surat izin kerja aman adalah sebuah dokumen atau izin tertulis yang digunakan untuk mengontrol jenis pekerjaan tertentu yang berpotensi membahayakan pekerja.

Dalam penerapan izin kerja ini terdapat tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap proses dan tahap penyelesaian dimana ketiga tahapan tersebut harus dijalankan dan dilakukan dengan baik jika tidak dilakukan dengan baik pekerjaan tersebut dapat tertunda serta potensi bahaya risiko yang terdapat dalam suatu pekerjaan tidak akan dapat dikontrol sehingga dapat menyebabkan kecelakaan kerja yang terus bertambah (*Health and Safety Executive, 2005*).

PT. Tokyu Construction Indonesia adalah perusahaan yang didirikan oleh Tokyu Construction Co. Ltd. dari Jepang dan PT MITRA KARSA pada tahun 2011, dimana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang konstruksi.

Berdasarkan studi awal yang dilakukan penerapan izin kerja sudah cukup baik, namun pada tahapan proses yaitu tentang perpanjangan izin kerja ditemukan formulir izin kerja yang belum diperpanjang dan masih ada *requestor* yang dalam pengisian formulir izin kerja tersebut belum tepat. Dampak dari hal ini adalah tertundanya pekerjaan karena ketika formulir tersebut belum disahkan, maka pekerjaan tidak akan dimulai. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui analisis implementasi prosedur izin kerja di ketinggian pada proyek MRT CP 101 PT Tokyu Construction Lebak Bulus Jakarta Selatan.

Bahan dan Metode

Desain studi Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara dan telaah dokumen. Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan prosedur izin kerja yang terdiri dari tahapan persiapan, proses dan penutupan. Alat pengumpulan data berupa alat perekam suara, kamera dan lembar izin kerja. Hasil pengumpulan data ini akan disajikan dalam bentuk matriks dan dilakukan analisis.

Hasil Penelitian

PT. Tokyu Construction telah menerapkan sistem izin kerja salah satunya pada pekerjaan di ketinggian. Izin kerja di PT. Tokyu ini terdapat 2 jenis izin kerja, yaitu izin kerja untuk pekerjaan *overtime* yang berlaku satu hari dan izin kerja (*Permit To Work*) yang berlaku satu minggu. Dalam pembuatan izin kerja ini, selalu dilampirkan *Job safety Analysis* (JSA). Dimana di dalam JSA ini terdapat langkah - langkah pekerjaan yang akan dilakukan, potensi bahaya, serta kontrol yang dilakukan. Pekerjaan yang dinilai sebagai *fatality* atau *critical work* harus membuat izin kerja, agar pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan aman dan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.

Tahap Persiapan Izin Kerja Koordinasi

Hasil analisis implementasi prosedur izin kerja pada tahap persiapan yaitu koordinasi, berdasarkan hasil hasil wawancara dan telaah dokumen adalah PT. Tokyu melakukan koordinasi mengenai prosedur izin kerja dengan baik yaitu dengan melakukan kegiatan yang berupa presentasi awal untuk membicarakan pekerjaan apa yang akan dilakukan, melakukan pertemuan mingguan atau *Weekly Meeting* dan *Monthly Meeting*.

Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus disiapkan dalam pembuatan surat izin kerja. Dalam perencanaan berisi tentang kegiatan apa

saja yang akan dilakukan dalam satu minggu, menentukan metode kerja dan juga menganalisa bahaya apa saja yang terdapat dalam pekerjaan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara serta telaah dokumen yang didapatkan adalah terlaksanannya perencanaan pada tahap persiapan izin kerja, dimana perencanaan ini dibuat dalam lembar daftar kerja yang akan dilakukan satu minggu kedepan yang ditulis dalam izin kerja serta pembuatan mapping dimana pekerjaan tersebut akan dilakukan. Dalam melakukan penilaian bahaya, masuk kedalam perencanaan ini.

Penilaian Bahaya

Proses penyusunan penilaian bahaya biasanya dilakukan bersama oleh pihak SHE, *site engineer, site manager* serta supervisor. Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen bahwa PT. Tokyu telah melakukan penilaian bahaya terhadap aktivitas yang akan dilakukan dengan menggunakan metode JSA. Dimana dalam pembuatan JSA ini dilakukan bersamaan dengan perencanaan. JSA dibuat berdasarkan dokumen JSA yang ada di safety. Ketika terdapat pekerjaan yang baru, maka JSA tersebut di *update* kembali untuk ditambahkan pekerjaan baru tersebut ke dalam JSA.

Tindakan Pencegahan

Tindakan pencegahan sangat penting untuk dilakukan pada pembuatan izin kerja. Jenis tindakan pencegahan didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen PT. Tokyu melakukan upaya pencegahan sesuai dengan yang tercantum dalam JSA, JSA ini dilampirkan dalam pembuatan izin kerja. Tindakan pencegahan yang sering dilakukan adalah dengan penggunaan APD lengkap sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Untuk tindakan pencegahan di area kerja digunakan *barrier line* agar aman.

Tanda Tangan

Sebelum melakukan pekerjaan, izin kerja harus ditanda tangani terlebih dahulu agar izin kerja tersebut dapat dilaksanakan. Berdasarkan hasil dari wawancara dan telaah dokumen untuk

pengesahan izin kerja dilakukan oleh *project manager*. Kolom pengesahan ini terdapat dalam lembar izin kerja, dimana jika izin kerja tersebut belum disahkan maka pekerjaan tersebut tidak dapat dimulai.

Tahapan Proses Izin Kerja ***Display Permit***

Surat izin yang telah disahkan dan ditanda tangani harus di tunjukan di tempat dimana pekerjaan tersebut akan dilakukan. Jika tidak dapat ditampilkan di area kerja maka orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut seharusnya memegang salinan dan memastikan anggotanya sudah mengerti dengan izin kerja tersebut. berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen dapat disimpulkan bahwa izin kerja di tampilkan di area kerja, akan tetapi tidak semua tempat atau area kerja yang dapat menampilkan izin kerja tersebut, seperti di tempat ketinggian, ruang terbatas atau terdapat galian.

Revalidation

Revalidation atau perpanjangan izin kerja dapat dilakukan ketika sudah mendapat persetujuan oleh pihak yang mengeluarkan izin kerja, dengan catatan izin kerja yang asli tidak diubah dan pekerjaan tersebut di izinkan untuk dilanjutkan. Masa berlaku untuk izin kerja sendiri di PT. Tokyu terdapat 2 izin kerja. Yang berlaku selama satu *shift* atau satu hari, dan yang berlaku selama satu minggu. Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen bahwa perpanjangan dilakukan sehari sebelum masa berlaku izin kerja tersebut habis. Dan dalam perpanjangan izin kerja harus diketahui dan ditanda tangani kembali oleh *project manager*. Namun ada beberapa dokumen yang ditemukan belum memperpanjang izin kerja (terlambat untuk memperpanjang izin kerja), dan itu dikarenakan dari *requestornya* sendiri yang lupa untuk memperpanjang karena volume pekerjaan yang banyak, yang harus di *handle*.

Suspension

PT. Tokyu pernah melakukan *suspension* ini saat aktivitas bekerja diketinggian dilakukan, karena pekerja

tidak menggunakan *body harness* saat bekerja, ataupun *green tag* pada *scaffolding* telah *expired* dan *scaffolding* tidak memenuhi standar untuk digunakan.

Shift Hand Over

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen didapatkan bahwa PT. Tokyu tidak memiliki pembagian shift kerja, hanya ada *overtime* saja atau kerja lembur.

Tindakan Darurat

Hasil yang didapat dari wawancara dan telaah dokumen adalah jika di PT. Tokyu terjadi tindakan darurat, semua para pekerja akan dikumpulkan ke *assembly point* atau titik berkumpul, dan untuk selanjutnya di data ulang atau dilakukan absensi. Dan disetiap titik juga sudah disediakan APAR, apabila terjadi keadaan darurat kebakaran maka APAR tersebut dapat digunakan. Untuk simulasi keadaan gawat darurat telah dilakukan sekali yaitu untuk simulasi kebakaran.

Pemantauan

Pemantauan prosedur izin kerja di lapangan dilakukan dengan cara *safety patrol*. *Safety patrol* sendiri ada yang harian, yaitu yang dilakukan pada pukul 10 WIB. Untuk *safety patrol* perminggu dilakukan setiap hari Jum'at pada pagi hari dan untuk yang perbulan dilakukan bersamaan dengan pihak *maincon*.

Tahap Penutupan Izin Kerja

Pengembalian izin kerja

Pengembalian izin kerja yang ada di PT. Tokyu, dilakukan apabila pekerjaan telah selesai dilakukan, kemudian izin kerja tersebut diserahkan kepada *safety admin*. Lembar penutupan juga harus diisi dan ditanda tangani oleh *site engineer*, *site manager* dan *project manager*, bahwa pekerjaan tersebut telah selesai.

Inspeksi Lokal

Inspeksi lokal dilakukan untuk memastikan bahwa tempat kerja atau area kerja yang digunakan telah kembali ke kondisi semula atau kembali aman. Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen di dapatkan bahwa PT. Tokyu telah menjalankan inspeksi ulang

sebelum izin kerja tersebut dikembalikan kepada *safety admin*.

Cancellation of overrides / Pembatalan izin kerja

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen didapatkan bahwa di PT. Tokyu belum pernah terjadi pembatalan izin kerja, hanya izin kerja tersebut yang harus diperbaiki untuk melengkapi item yang belum lengkap.

Pengembalian Alat

Pengembalian alat sudah cukup baik. Dimana berdasarkan wawancara dan telaah dokumen alat berat akan dikembalikan ke bagian logistik. Sedangkan untuk alat apd dikembalikan ke bagian *safety*. Dan untuk alat yang pekerja bawa sendiri, maka akan di bawa pulang kembali oleh pekerja. Kelengkapan dan kondisi alat juga dilihat pada saat pengembalian alat ini.

Pencatatan/ Pendokumentasian

Pendokumentasian sangat penting dilakukan, karena dilakukan pencatatan ini sebagai bahan atau barang bukti bila suatu saat diadakan audit (audit internal ataupun eksternal).

Pembahasan

Pada tahap persiapan untuk melakukan koordinasi di PT. Tokyu dilakukan dengan cara diadakannya *meeting*. *Meeting* awal dilakukan oleh *site engginer* beserta semua pihak yang terlibat di dalam pembuatan izin kerja (*Supervisor, Project Manager, Safety*). *Meeting* ini sebagai presentasi awal untuk keseluruhan, dimana dalam *meeting* awal ini *site engineer* menyampaikan aktivitas apa yang akan dikerjakan beserta dengan penilaian bahaya. Untuk hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara bahwa dalam koordinasi untuk pengerjaan aktivitas di lapangan, *site engineer* atau *requestor* melakukan koordinasi dengan tim *safety* untuk pemakaian akses, koordinasi dengan pekerja untuk pengangkatan material dan juga koordinasi pada pihak - pihak lain seperti *supervisor* dan *worker*. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusmiwardhani dkk., (2013) yang menjelaskan bahwa, koordinasi dimulai oleh pihak pengaju

untuk melakukan penetapan pekerjaan (sesuai dengan jenis dan faktor bahayanya) tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat.

Tahap perencanaan memuat seluruh perencanaan kegiatan, penilaian bahaya, *mapping area* dan juga tindakan pencegahan. Dalam perencanaan ini kegiatan yang akan dilakukan selama satu minggu kedepan harus dicantumkan dalam izin kerja. Hal ini berkenaan dengan penilaian bahaya yang akan dilakukan terhadap aktivitas yang akan dikerjakan. Penilaian bahaya tersebut dilakukan dengan menggunakan metode *Job Safety Analysis* (JSA). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusmiwardhani dkk., (2013) dalam tahap perencanaan terkait dengan identifikasi semua potensi bahaya, tindakan pencegahan dan persiapan untuk melakukan pekerjaan di tempat kerja.

Pada tahap penilaian bahaya yang digunakan oleh PT. Tokyu adalah dengan metode *Job Safety Analysis* (JSA). Dalam formulir JSA ini berisikan tentang langkah – langkah pekerjaan yang dilakukan, potensi bahaya yang terdapat dalam kegiatan tersebut, serta tindakan pencegahan atau kontrol yang telah dilakukan di tempat kerja. Terutama untuk bekerja diketinggian, makai zin kerja diketinggian tersebut harus melampirkan JSA (Nareswari dan Paskarini, 2017). Hal ini sesuai dengan teori *International Association of Oil & Gas Producers* (1993) bahwa, untuk mengidentifikasi semua bahaya potensial, dan pelaksanaan tindakan pencegahan, salah satu teknik yang cukup efektif adalah dengan penggunaan *Job Safety Analysis*. Namun dalam hal pembaruan JSA belum memiliki prosedur sendiri, hanya jika terdapat pekerjaan baru saja, maka JSA tersebut diperbarui.

Pada tahap tindakan pencegahan ini berhubungan dengan *Job Safety Analysis*, karena dalam formulir JSA ini telah terdapat tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini seperti penggunaan alat pelindung diri (APD) dan *extinguisher* atau alat pemadam, tidak lupa juga untuk pengecekan pada alat yang akan digunakan untuk bekerja, seperti *scaffolding* yang digunakan pada

pekerjaan ketinggian. Untuk tindakan pencegahan yang dilakukan pada area kerja jika terdapat potensi bahaya yaitu dilakukan dengan menggunakan *barrier* atau *safety line*. Hal ini sesuai dengan teori *International Association of Oil & Gas Producers* (1993) bahwa, jenis tindakan pencegahan didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan. Secara garis besar adalah mengenai; keamanan personil berupa APD digunakan atau dipakai dan keamanan plant atau peralatan yang berhubungan dengan pekerjaan.

Tahapan terakhir dalam persiapan izin kerja adalah tanda tangan. Penanda tangan izin kerja ini dilakukan untuk mengesahkan lembar izin kerja tersebut. di PT. Tokyu yang berwenang untuk memberikan tanda tangan pada lembar izin kerja adalah dari pihak *owner* yaitu, *Project Manger* dari *maincon*. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuadi dkk., (2015) proses pengesahan surat izin kerja ini dilakukan oleh pemegang otoritas, dimana pemegang otoritas tertinggi yaitu *Project Manager* dari *maincon*.

Pada tahapan proses izin kerja yaitu *display permit* sudah cukup baik dengan menampilkan izin kerja menggunakan *box display*, akan tetapi untuk tempat atau area tertentu izin kerja tersebut tidak ditampilkan. karena ada beberapa area kerja yang tidak memungkinkan untuk di tampilkan izin kerja tersebut. Contoh area kerja tersebut seperti, *confined space* (area terbatas), area galian dan di area ketinggian. Untuk area yang tidak ditampilkan izin kerja maka site enginer atau supervisor langsung memberitahukan izin kerja tersebut kepada para pekerja, dan untuk mandor diberikan salinan dari izin kerja tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Raya dkk., (2014) salinan izin kerja diberitahukan kepada pekerja dengan cara menggunakan *box display* sehingga dapat memberikan informasi kepada orang lain/yang tidak terlibat pekerjaan secara langsung mengetahui bahwa ada pekerjaan yang sedang dilakukan.

Pada perpanjangan izin kerja atau *Revalidation* terdapat keterlambatan. Dimana seharusnya izin kerja

diperpanjang sehari sebelum masa berlaku izin kerja tersebut habis. Hal ini disebabkan oleh beban kerja *site engineer* yang padat karena satu *site engineer* memegang kendali atas satu wilayah kerja, yang dimana wilayah atau area kerja tersebut terbilang luas sehingga banyak pekerjaan yang dilakukan. Beban kerja yang padat itu menyebabkan *site engineer* terkadang lupa untuk memperpanjang. Namun hal ini diminimalisir oleh tim *safety*, karena tim *safety* selalu mengingatkan untuk memperpanjang izin kerja.

Pemberhentian pekerjaan secara mendadak (*Suspension*) di PT. Tokyu dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian yaitu jika pekerja tidak memakai APD dengan benar, *green tag* untuk *scaffolding* dan *scaffolding* itu sendiri yang tidak memenuhi standar. Selain itu pemberhentian secara mendadak dapat diakibatkan juga karena turun hujan dan pekerja yang tidak patuh atau nakal, yaitu dengan merokok pada saat pekerjaan dilakukan. Berkaitan dengan ketidaksesuaian tersebut maka, hal itu dapat memicu terjadinya kondisi yang tidak aman, maka pekerjaan tersebut dihentikan secara mendadak. Hal ini sesuai dengan penelitian terkait oleh Nareshwari dan Paskarini (2017) bahwa, Pekerjaan juga dapat diberhentikan jika terdapat kondisi yang tidak aman.

Hasil Analisa tentang *shift hand-over* pada tahap proses izin kerja didapatkan bahwa di PT. Tokyu tidak diberlakukan sistem *shift*. Yang terdapat di PT. Tokyu ini hanya kerja lembur atau *overtime*. Dimana jika terjadi *overtime*, maka pemberitahuan yang dilakukan tentang izin kerja kepada pekerja yaitu secara langsung. Pekerjaan *overtime* ini dilakukan sampai pukul 22.00 WIB. Pekerja yang melakukan pekerjaan ini adalah pekerja yang sama, jadi tidak perlu untuk melakukan serah terima izin kerja.

Tindakan darurat di PT. Tokyu adalah dengan menghenikan pekerjaan dan mengumpulkan para pekerja beserta staff ke titik berkumpul. dan untuk selanjutnya di data ulang atau dilakukan absensi. Untuk simulasi terhadap terjadinya keadaan gawat darurat, PT. Tokyu sendiri telah melakukan simulasi kebakaran sebanyak 1 kali. Untuk

simulasi dilakukan setiap 1 tahun sekali. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusmiwardhani dkk., (2013) keadaan darurat jika terjadi perubahan keadaan yang dapat membahayakan kelanjutan pekerjaan diberhentikan. Pemberitahuan tentang keadaan darurat ini juga telah disampaikan oleh pihak *safety* kepada siapa saja yang akan masuk ke dalam ruang kerja PT. Tokyu, dengan cara melakukan induksi. Jadi setiap orang yang akan memasuki wilayah PT. Tokyu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat.

Pemantauan pada tahap proses ini dilakukan dengan cara *safety patrol*. *Safety patrol* ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang ada, perminggu dan perbulan. Untuk jadwal *safety patrol* perminggu, dilakukan hari Jum'at pada waktu pagi hari. Untuk jadwal perbulan dilakukan bersama dengan pihak *maincon*. *Safety patrol* ini dilakukan untuk memantau pekerjaan yang dilakukan dilapangan, apakah sudah sesuai dengan izin kerja atau tidak. *Safety patrol* ini untuk melihat apakah para pekerja telah sesuai menggunakan APD (sebagai tindakan pencegahan) yang tertera pada izin kerja atau tidak, serta alat yang dipakai dilapangan apakah sudah sesuai dengan standar. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudhana (2017) pemantauan dilakukan untuk mengawasi pekerjaan dan untuk memverifikasi izin kerja di lapangan.

Pada tahap terakhir yaitu tahap penutupan izin kerja, harus dilakukan pengembalian izin kerja. Hasil penelitian didapatkan pengembalian izin kerja dilakukan perminggu. Penelitian yang dilakukan oleh Kusmiwardhani dkk., (2013) untuk melakukan penutupan izin kerja apabila area kerja telah selesai, maka lampiran *safety permit* tersebut dikembalikan kepada *safety officer* atau pihak K3. PT. Tokyu telah sesuai dengan penelitian ini, dimana izin kerja akan dikembalikan ke bagian *safety*.

Inspeksi lokal pada tahap penutupan PT. Tokyu telah melakukannya dengan melakukan inspeksi pada area yang telah selesai digunakan untuk bekerja. Inspeksi ini dilakukan untuk memastikan kondisi area yang ditinggalkan dalam keadaan aman.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Raya dkk., (2014) sebelum ditanda tangan oleh pihak yang berwenang tempat kerja yang ditinggalkan harus dengan kondisi aman. Inspeksi biasanya dilakukan dengan pihak *maincon*, bersamaan dengan penutupan izin kerja tersebut.

Cancellation of overrides atau pembatalan izin kerja di PT. Tokyu belum pernah terjadi yang ada hanya pengecekan kembali izin kerja yang bilamana terdapat item yang belum terpenuhi maka item tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu baru izin kerja tersebut dapat dijalankan.

Pembatalan izin kerja ini berhubungan dengan keadaan gawat darurat yaitu kebakaran dan deteksi gas. Oleh karena itu prosedur penanganan keadaan darurat seperti kebakaran harus dibuat. Hal ini sesuai dengan Permenaker No. Per-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja lampiran I poin : Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana yang berisi, perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menghadapi keadaan darurat atau bencana, yang diuji secara berkala untuk mengetahui kendala pada saat kejadian yang sebenarnya.

Hasil analisis tentang pengembalian alat, bahwa pengembalian alat dilakukan sesuai dengan jenis alat tersebut. Untuk pengembalian alat berat seperti *excavator* dan *crane* akan dikembalikan ke bagian logistik. Sedangkan untuk alat – alat pelindung diri, seperti *body harness* akan dikembalikan ke bagian *safety*, sedangkan untuk alat yang memang dari awal dibawa oleh pekerja maka alat tersebut akan pekerja bawa pulang kembali. Dalam pengembalian alat PT. Tokyu melakukan pencatatan tentang alat yang dipinjam, catatan tersebut berupa *log book* peminjaman alat. Sebelum pengembalian alat dipastikan kembali kelengkapan dan kondisi dari alat tersebut. Hal ini sesuai dengan teori *International Association of Oil & Gas Producers* (1993) dalam mengembalikan peralatan dibawah sistem P.T.W. harus mempertimbangkan bahwa peralatan ditempat kerja sudah lengkap dan *plant* atau peralatan ditinggalkan dalam

kondisi yang aman. Untuk pengembalian alat ini belum terdapat prosedur yang menjelaskan tentang tata cara pengembalian alat, maupun itu alat berat atau APD.

Pendokumentasian atau pencatatan dilakukan oleh pihak *safety*. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusmiwardhani dkk., (2013) untuk pendokumentasian dilakukan oleh *safety officer* atau pihak K3. Pendokumentasian ini berfungsi sebagai bukti jika sewaktu dilakukan audit (audit internal ataupun eksternal), bahwa PT. Tokyu telah melakukan atau menerapkan izin kerja. pendokumentasian ini dilakukan dengan membuat *log book*, yang dipegang oleh pihak *safety*. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nareshwari dan Pakarini (2017) bahwa, pendokumentasian surat izin kerja aman dilakukan dengan membuat *log book* yang dipegang oleh *Asset Holder*. Maksud dari *Asset Holder* disini adalah tim atau pihak *safety*.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan hasil penelitian Implementasi prosedur izin kerja di ketinggian pada proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) CP 101 PT Tokyu *Construction* Lebak Bulus Jakarta Selatan tahun 2018 secara umum sudah baik, mulai dari tahap persiapan, tahap proses dan terakhir tahap penutupan. Hanya untuk tahapan proses pada bagian perpanjangan ada beberapa izin kerja yang mengalami keterlambatan dalam perpanjangan, hal ini dikarenakan beban kerja yang banyak sehingga lupa untuk melakukan perpanjangan izin kerja. Untuk *suspension*, biasanya terjadi jika ADP tidak digunakan dengan benar dan alat yang digunakan tidak sesuai standar.

Saran yang dapat diberikan agar implementasi prosedur izin kerja dapat berjalan lancar dan optimal yaitu :

1. Tahapan persiapan izin kerja, lampiran izin kerja yaitu JSA seharusnya ketika pekerjaan itu diperpanjang, harus dilakukan penilaian bahaya kembali, setidaknya seminggu sekali mengikuti perpanjangan izin kerja agar *Job Safety Analysis* (JSA) tersebut sesuai dengan keadaan di lapangan.

2. Tahapan proses izin kerja seharusnya untuk *requestor (site engineer)* memiliki catatan jadwal untuk masing – masing lembar izin kerja dan diletakkan di tempat yang terlihat agar izin kerja yang telah diajukan dapat diketahui masa berlakunya sampai tanggal berapa. Dan untuk *safety* harus selalu mengingatkan kembali untuk memperpanjang jika ada izin kerja yang belum selesai aktivitas pengerjaannya. Sedangkan untuk pemberhentian mendadak pada suatu pekerjaan, dapat dihindari dengan cara pengecekan peralatan di awal sesuai dengan yang tertera dalam izin kerja, untuk menyikapi para pekerja yang nakal dan tidak patuh pada peraturan, jika tim *safety* sedang tidak ada di tempat untuk mengawasi maka dari pihak *supervisor* ataupun mandor harus selalu mengingatkan kembali agar pekerja yang nakal tersebut dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika masih ada masalah dengan alat (seperti *scaffolding*) dan APD yang tidak lengkap, maka pekerjaan tersebut belum boleh dikerjakan.
3. Pembatalan izin kerja belum pernah dilakukan, namun prosedur penanganan keadaan darurat seperti kebakaran dan deteksi gas harus dibuat karena berkenaan dengan kondisi gawat darurat. Dan untuk pengembalian alat belum memiliki prosedur, sehingga lebih baik jika di buat prosedur untuk pengembalian alat agar kondisi peralatan yang dipinjam selalu dalam kondisi baik.

Daftar Pustaka

- BPJS. (2015). *Jumlah Kecelakaan Kerja di Indonesia*. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/5769/Jumlah-kecelakaan-kerja-di-Indonesiamasih-tinggi.html>
- Bureau Of Labour Statistic (2015). *Injuries, Illnesses, and Fatalities*. <https://www.bls.gov/iif/>.
- Chow, Y. Y. (2017). *Case studies of Accidents involving Work At Height*. <https://www.wshc.sg/files/wshc/upload/infostop/attachmen>

[ts/2017/IS201704210000000417/Case_Studies_of_Accidents_Involving_Working_at_Heights.pdf](https://www.wshc.sg/files/wshc/upload/infostop/attachmen/2017/IS201704210000000417/Case_Studies_of_Accidents_Involving_Working_at_Heights.pdf)

European Industrial Gases Association.(2002). *Work Permit System*. Europe : Brussels.

Government of Alberta (2010). *Safe Work Permits*.<https://work.alberta.ca/documents/WHS-PUB-SH013.pdf>

Health and Safety Executive.(1997). *Permit To Work System*. http://antariconsulting.com/docs/guides/unit_igc1/Permit_to_work_systems_indg98.pdf

Health and Safety Executive.(2005). *Guidance on permit-to-work systems*. *Hsg250*, pp. 1–40

Hughes, P. (2015). *Introduction to Health and Safety at Work: For the NEBOSH National General Certificate in Occupational Health and Safety*. Routledge. https://books.google.co.id/books?id=futzCgAAQBAJ&dq=permit+to+work+introduction+safety+at+work&hl=id&source=gbs_navlinks_s

Iliffe, R. E., Chung, P. W. H. and Kletz, T. A. (1999). *More effective permit-to-work systems, Process Safety and Environmental Protection*. *The Institution of Chemical Engineers*, 77(2), pp. 69–76. doi: 10.1205/095758299529839

International Association of Oil & Gas Producers (1993). *Guidelines on permit to Work (P.T.W.) system*. London.

Khaqim, E. S. (2014). *KEJADIAN KECELAKAAN KERJA DI PT . BAKRIE*.<http://eprints.ums.ac.id/32303/14/NASKAHPUBLIKASI.pdf>

Kusmiwardhani, Dian Ayu. et al. (2013). *Analisis Pelaksanaan Safety Permit Berdasarkan Prosedur Sistem Permit to Work di PT . PJB UBJ O & M Paiton*. Jember: FKM Universitas Jember.

Menteri Tenaga Kerja. (1996). *Permenaker No. 05/MEN/1996*

- Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.* Jakarta : Permenaker RI.
- Nareshwari & Paskarini, Indriati. (2017). *Identification And Analysis Of Sika Implementation In Pt Pertamina Ep Prabumulih.* pp. 146-155. 10.20473/ijosh.v6i2.2017.146-155
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Oxford Brookes University (2015). *Code Of Practice For Permits to Work.* https://www.brookes.ac.uk/services/hr/health_safety/permit_to_work/procedure.html
- Pemerintah Republik Indonesia (1970). *Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.*Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia (1992). *Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Nasional Tenaga Kerja.*Jakarta : Sekretariat Negara.
- Rachman, Taufiqur.(2014). *Pengelolaan Komunikasi dan Penerapan K3.* Jakarta.<http://taufiqurrachman.weblog.esaunggul.ac.id>
- Raya, T. et al. (2014). *Analisis Penerapan Sistem Izin Kerja Panas Pada Bagian Plantis Di PT . Indo Acidatama , Tbk (Berdasarkan Guidance on Permit to Work Systems tahun 2005).* Kesehatan Masyarakat, 2, pp. 214-222
- Semiawan, C. R. (2010) *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Grasindo.
- United States Departement Of Labor (2016). *Occupational Safety and Health Administration.* <https://www.osha.gov/oshstats/commonstats.html>
- Verma,S.(2102). *Permit to Work.* <https://www.cleanindiajournal.com/permit-to-work/>
- Wahyuadi, H. T., Kurniawan, B. and Ekawati (2015). *Analisis Implementasi Izin Kerja di Ketinggian Terhadap Kecelakaan Kerja di PT. X.* Semarang : FKM Universitas Diponegoro. p. 429. <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Yudhana, A. (2017). *Implementation of work safety permit as an effort to prevent accidents at PT petrokimia gresik.* Kediri : Stikes Surya Mitra Husada., pp. 174-178. <https://www.atlantispress.com/proceedings/inc17/25886912>



Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul